

Diklat

**KAJIAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PENDIDIKAN SENI TARI**

**HASIL LOKAKARYA PENELITIAN DIKTAT PERKULIAHAN  
PROGRAM HIBAH KOMPETISI A-1 BACH III TERMIN II 2007**

**TANGGAL 30 AGUSTUS 2007**



Oleh : Rumi Wiharsih  
Wenti Nuryani

**JURUSAN PENDIDIKAN SENI TARI  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2007**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya diktat sederhana ini dapat terwujud.. Untuk itu ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada:

1. Ketua Jurusan Pendidikan Seni Tari.
2. Ketua Program Hibah Kompetisi A-1 Bach II, termin II, tahun 2007.
3. Tim Pengampu mata kuliah Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Seni Tari.
4. Semua Dosen Jurusan Pendidikan Seni Tari. FBS-UNY
5. Semua mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS-UNY.
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga segala dukungannya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata semoga diktat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Amien.

Yogyakarta, Desember 2007

Penyusun.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kurikulum.....	1
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kurikulum.....	9
C. Tujuan Pendidikan Nasional.....	13
BAB II KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN/KTSP.....	16
A. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan .....	16
a. Pengertian .....	16
b. Prinsip Penilaian .....	17
c. Teknik dan Instrumen Penilaian .....	18
d. Mekanisme dan Prosedur Penilaian.....	19
e. Penilaian oleh Pendidik .....	21
f. Penilaian oleh Satuan Pendidikan.....	22
g. Penilaian oleh Pemerintah .....	24
BAB III STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH .....	25
A. Visi Sekolah/Madrasah .....	25
B. Misi Sekolah/Madrasah .....	25
C. Rencana Kerja Empat Tahunan .....	26
D. Pedoman Pengelolaan Sekolah/Madrasah .....	26
E. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran .....	27
F. Kalender Pendidikan.....	28
G. Program Pembelajaran.....	28
H. Penilaian hasil Belajar Peserta Didik .....	30
I. Peraturan Akademik .....	31
BAB IV. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU	
A. Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/SD .....	33

a. Kompetensi Pedagogik .....	33
b. Kompetensi Kepribadian .....	36
c. Kompetensi Sosial .....	36
d. Kompetensi Profesiol.....	37
B. Evaluasi dan Pengembangan.....	38
BAB V MATA PELAJARAN SENI BUDAYA.....	39
A. Karakteristik Mata Pelajaran Seni Budaya .....	39
B. Pengertian .....	41
C. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Seni Budaya .....	41
D. Ruang Lingkup .....	41
E. Standar Kompetensi Lintas Kurikulum .....	42
F. Standar Kompetensi Bahan Kajian Seni Tari .....	43
G. Standar Kompetensi Mata Pelajaran.....	44
H. Rambu-rambu .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kurikulum

Perwujudan masyarakat berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif mandiri dan professional pada bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperlukan, terutama untuk mengantisipasi era kesejagadan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan Negara-negara ASEAN, seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*), dan AFLA (*Asean Free Labour Area*), maupun di kawasan Negara-negara Asia Pasifik (APEC).

Visi reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan reformasi kehidupan nasional yang tertera dalam garis-garis besar haluan Negara adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin (Mulyasa 2003)..

Dalam era globalisasi di pasar bebas manusia dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. Ibarat nelayan di lautan lepas yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki kompas sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarahkannya. Hal tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak linear antara pendidikan dan lapangan kerja atau "*one stop one relationship*", karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan. Menanggapi hal tersebut dan krisis moneter yang melanda negara-negara Asia akhir-akhir ini, Direktur Pasific Economic Cooperation (dalam Tilar, 1998) menyatakan bahwa bangsa-bangsa khususnya di Asia Pasific perlu mempunyai "*outward and forward looking*". Pembangunan nasional jangan hanya melihat kepada kebutuhan internal masyarakat dan bangsa, tetapi

juga pandangan tersebut perlu dijalin dengan pandangan ke luar dan ke depan, karena masyarakat dan bangsa kita adalah bagian dari suatu masyarakat dunia yang semakin menyatu.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada tujuh masalah pokok system pendidikan nasional: (1) menurunnya ahlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal system pendidikan, (4) status kelembagaan, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (7) sumber daya yang belum profesional.

Menghadapi hal tersebut perlu dilakukan penataan terhadap system pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam hal ini perlu adanya perubahan social yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill atau life competency*) yang sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Pemecahan masalah secara reflektif sangat penting dalam kegiatan belajar yang dilakukan melalui kerjasama secara demokratis. Unesco (1994) mengemukakan dua prinsip pendidikan yang sangat relevan dengan Pancasila, *pertama*, pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*), belajar dalam kebersamaan (*learning to be*).: *kedua*, belajar seumur hidup (*life long learning*). Kultur yang demikian harus dikembangkan dalam pembangunan kehidupan manusia, karena pada akhirnya aspek cultural dari kehidupan manusia lebih penting dari pertumbuhan ekonomi.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara konvensional maupun secara inovatif. Hal tersebut lebih

terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jejang pendidikan. Sebagian sekolah terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya terdapat tiga factor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami perubahan secara merata (Depdiknas, 2001:1-2).

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, Faktor ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan system pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak (*soft ware*) maupun perangkat keras (*hard ware*). Diantara upaya tersebut, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Bila sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangannya berada pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Dalam kaitan ini visi, misi dan strategi Kantor Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat kabupaten harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata organisasi maupun lingkungannya dan harus mendukung pula misi pendidikan nasional, serta harus mampu memelihara garis kebijaksanaan dari birokrasi yang lebih tinggi. Di samping itu tujuan harus layak, dapat dicapai dengan kemampuan yang ada, serta memiliki wawasan tentang gambaran ideal kondisi pendidikan yang diharapkan di masa depan.

Sidi (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu rekonstruksi dalam rangka otonomi daerah. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan

efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan. Keempat hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui consensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang mungkin akan berbeda antar sekolah atau antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal, normal (mainstream), dan unggulan.
- (2) Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
- (3) Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah.
- (4) Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan uraian di atas, dan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, mengantisipasi perubahan-perubahan global pada persaingan pasar bebas, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih, maka pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan



dan demokratis (*democratic education*). Hal tersebut harus dikondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (*mini society*) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis (*democratic instruction*), agar terjadi proses belajar yang menyenangkan (*joyfull learning*). (Mulyasa, 2003: 6-7).

Dengan iklim yang demikian, pendidikan diharapkan mampu melahirkan calon-calon penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif dan siap menghadapi berbagai macam tantangan, dengan tetap bertawakal terhadap sang penciptanya. Bahwa apa yang dihadapi, apa yang terjadi, merupakan kehendak illahi yang harus dihadapi dan disyukuri.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional yang dipandang oleh berbagai pihak sudah tidak efektif, dan tidak mampu lagi memberikan bekal, serta tidak dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan **kurikulum**, yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan **kurikulum berbasis kompetensi** (*competency based curriculum*), yang saat itu (tahun 2004 sampai dengan 2006) diuji cobakan, diharapkan dapat membekali siswa/peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, guna menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan social, lentur dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap system pendidikan secara efektif, efisien dan berhasil guna.